



---

## **Akomodasi Komunikasi Komunitas Hindu Bali Sebagai Penduduk Pendetang Di Daerah Transmigrasi**

Oleh :  
I Wayan Astraguna<sup>1</sup>  
Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram  
Program Studi Ilmu Komunikasi Hindu  
[Iwastra@iahn-gdepudja.ac.id](mailto:Iwastra@iahn-gdepudja.ac.id)

### **ABSTRACT**

*This research aims to examine the communication strategies used by the Balinese Hindu community in adapting as a migrant group in the transmigration area of South Sulawesi. Using a descriptive qualitative approach and Howard Giles' Communication Accommodation theory, this research found that the Balinese Hindu community implemented convergence and divergence strategies in maintaining social harmony. The active participation of women and vulnerable groups also shows inclusiveness in the adaptation process. This research confirms that communication is a key factor in successful social integration and preventing conflicts with SARA nuances (Ethnicity, Religion, Race) that can arise due to economic inequality. Thus, the findings of this research lie in emphasizing that the success of social integration is not only determined by economic aspects or state policy, but is deeply influenced by cross-cultural communication skills carried out consciously, strategically and participatively by the community itself.*

***Keywords: Social Adaptation, Intercultural Communication, Transmigration, Balinese Hinduism, Accommodation Theory, Social Harmony***

### **I. Pendahuluan**

Transmigrasi di Indonesia merupakan bentuk mobilitas penduduk yang dirancang sebagai solusi pemerataan penduduk dan pengentasan kemiskinan. Program ini telah berlangsung sejak masa kolonial dan secara sistematis digalakkan kembali setelah kemerdekaan, dengan tujuan utama untuk memindahkan penduduk dari daerah padat seperti Jawa, Bali, dan Madura ke wilayah yang kurang berkembang dan jarang berpenduduk, termasuk wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa seperti Sulawesi Selatan (Sutrisno et al. 2019; Yuniza and Inggawati 2021). Namun, transmigrasi tidak hanya berimplikasi pada pergeseran fisik dan ekonomi, melainkan juga berdampak luas terhadap dinamika sosial dan budaya di daerah tujuan.



Keputusan individu atau komunitas untuk berpindah umumnya dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan kondisi kehidupan yang lebih baik. Mengacu pada *Need and Stress Theory*, tekanan ekonomi, sosial, dan psikologis mendorong seseorang untuk mencari lingkungan baru yang dinilai memiliki *place utility* yang lebih menjanjikan (Susanti et al. 2024). Namun, keberhasilan secara ekonomi di daerah baru tidak serta merta menjamin penerimaan sosial secara utuh, terutama dalam masyarakat multietnis yang rentan terhadap konflik horizontal.

Program transmigrasi di Indonesia, yang dimulai sejak tahun 1947, tidak hanya melibatkan perpindahan fisik, tetapi juga pergeseran budaya dan sosial ekonomi yang signifikan (Sutrisno et al. 2019). Program ini bertujuan untuk meratakan kepadatan penduduk dari pulau-pulau padat seperti Jawa, Bali, dan Madura ke pulau-pulau yang kurang padat (Sada, Alas, and Anshari 2019; Yuniza and Inggarwati 2021).

Merujuk pada Undang-Undang Pokok Nomor 3 Tahun 1972, Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan sebagai salah satu wilayah tujuan program transmigrasi nasional. Penetapan ini kemudian diperkuat melalui Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1973 tanggal 4 Januari 1973, yang secara resmi menunjuk Sulawesi Selatan sebagai provinsi penerima transmigran. Dalam kurun waktu 1969 hingga 1975, pemerintah mencatat keberhasilan dalam mendistribusikan sekitar 5.184 kepala keluarga atau setara dengan 24.241 jiwa ke wilayah tersebut. Sebagian besar transmigran berasal dari Pulau Jawa, meliputi 1.517 kepala keluarga (7.205 jiwa) dari Jawa Timur, 901 kepala keluarga (4.516 jiwa) dari Jawa Tengah, 349 kepala keluarga (1.476 jiwa) dari Jawa Barat, serta 172 kepala keluarga (707 jiwa) dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, tercatat pula 250 kepala keluarga (1.195 jiwa) berasal dari Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Di luar Pulau Jawa, sejumlah 1.295 kepala keluarga atau sekitar 5.593 jiwa diketahui berasal dari Bali. Hingga tahun 2024 jumlah penduduk beragama hindu mencapai 63.402 jiwa (Andika 2020).

Kehadiran berbagai komunitas etnis di wilayah transmigrasi Sulawesi Selatan telah membentuk suatu realitas sosial yang bersifat majemuk. Dinamika keberagaman ini, di satu sisi, memperkaya khazanah budaya lokal, namun di sisi lain, menghadirkan tantangan tersendiri dalam upaya membangun dan mempertahankan harmoni sosial di



tengah perbedaan identitas budaya, nilai, dan tradisi yang melekat pada masing-masing kelompok. Hal ini memicu interaksi antara kelompok etnis yang berbeda dan menghasilkan dinamika sosial yang unik, terutama di daerah tujuan transmigrasi. (Setijadi 2022).

Salah satu komunitas yang menonjol dalam konteks ini adalah komunitas Hindu Bali. Di sejumlah daerah transmigrasi, termasuk di Sulawesi Selatan, kelompok ini menunjukkan tingkat keberhasilan ekonomi yang relatif tinggi dibandingkan kelompok etnis lokal lainnya. Etos kerja, kedisiplinan, serta kemampuan mengelola sumber daya secara mandiri menjadi faktor utama keberhasilan mereka. Nilai-nilai tersebut tidak hanya mendorong tercapainya keberhasilan secara ekonomi, tetapi juga memperkuat kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan masyarakat lokal di daerah tujuan. Hingga saat ini, banyak dari komunitas transmigran Hindu Bali tetap bertahan di wilayah transmigrasi dan menunjukkan keengganan untuk kembali ke daerah asal. Hal ini menunjukkan bahwa program transmigrasi bagi mereka tidak semata-mata dipandang sebagai upaya perpindahan karena alasan ekonomi, melainkan juga sebagai proses pengembangan budaya, pelestarian adat, dan penguatan identitas sosial di lingkungan baru. Namun, keberhasilan ini tidak jarang menimbulkan ketimpangan sosial dan kecemburuan ekonomi, yang dalam beberapa kasus menjadi pemicu munculnya benih-benih konflik antar kelompok.

Kesenjangan ini dapat berkembang menjadi konflik terbuka, terlebih jika dibumbui dengan sentimen perbedaan etnis dan agama, sehingga konflik yang awalnya berakar pada masalah ekonomi berubah menjadi konflik bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Isu ini menjadi sangat relevan mengingat Sulawesi Selatan adalah daerah dengan tradisi sosial yang kuat dan struktur budaya yang kohesif. Keberadaan komunitas pendatang yang menonjol secara ekonomi dapat dianggap sebagai ancaman simbolik maupun struktural oleh sebagian masyarakat lokal, terutama jika tidak dikelola melalui komunikasi yang inklusif.

Komunikasi sosial memegang peran esensial dalam kehidupan manusia karena melalui aktivitas komunikasi, individu mampu membangun dan membentuk konsep dirinya secara utuh. Komunikasi tidak hanya menjadi sarana vital bagi kelangsungan



hidup, tetapi juga menjadi medium untuk mencapai aktualisasi diri, memperoleh kepuasan emosional, serta membebaskan diri dari tekanan psikologis maupun rasa keterasingan sosial. Dalam konteks yang lebih luas, komunikasi berfungsi sebagai jembatan untuk menciptakan relasi interpersonal yang harmonis, menumbuhkan rasa saling memiliki, serta menyediakan ruang interaksi yang mampu memberikan hiburan, ketenangan batin, dan keseimbangan hidup. Oleh karena itu, komunikasi sosial tidak sekadar pertukaran pesan, tetapi merupakan fondasi utama dalam pembentukan identitas personal dan sosial seseorang dalam masyarakat (Ekawati 2024).

Dalam konteks ini, adaptasi sosial menjadi mekanisme penting yang menentukan apakah interaksi antar kelompok akan berjalan harmonis atau justru mengarah pada disintegrasi. Adaptasi sosial mencakup dimensi-dimensi penting seperti penerimaan nilai lokal, kesediaan untuk berinteraksi lintas budaya, serta pengelolaan perbedaan secara komunikatif. Adaptasi ini sangat bergantung pada proses komunikasi sosial yang sehat dan terbuka.

Penelitian mengenai perubahan sosial dan adaptasi sosial komunitas etnis di wilayah transmigrasi di berbagai daerah di Indonesia bukanlah merupakan kajian yang baru. Beragam studi sebelumnya telah banyak dilakukan untuk mengkaji dinamika sosial, proses integrasi, serta tantangan yang dihadapi oleh komunitas etnis dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru di wilayah transmigrasi. Pertama penelitian yang dilakukan oleh (Susanti et al. 2024) dengan judul “Studi sosial dan Ekonomi transmigrasi Jawa-Bali di desa Tugumulyo” menyatakan bahwa Desa Tugumulyo merupakan representasi keberhasilan program transmigrasi lokal yang dilaksanakan secara mandiri oleh komunitas Jawa dan Bali sejak tahun 1971. Desa ini menunjukkan perkembangan pesat di berbagai bidang, termasuk sosial, ekonomi, dan infrastruktur, yang dicapai melalui upaya perambahan hutan, pengelolaan lahan pertanian, serta peningkatan sarana pendidikan. Kehidupan masyarakat yang multikultural dan harmonis, ditopang oleh hubungan sosial yang saling mendukung, menjadi faktor utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan desa. Selain itu, capaian Tugumulyo menegaskan pentingnya sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan serta dalam memelihara kerukunan di tengah keberagaman



budaya. Demikian halnya penelitian yang dilakukan oleh Lutvi Dwi Nurlaili dengan judul “Transmigrasi Masyarakat Hindu Bali di Seputih Raman Lampung Tengah” ditemukan bahwa transmigrasi penduduk bali di daerah Raman Lampung Tengah cukup berhasil secara ekonomi dan juga mampu menjaga harmoni sosial di daerah tersebut (Nurlaili n.d.).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa program transmigrasi memberikan dampak positif terhadap daerah-daerah tujuan transmigrasi di Indonesia. Program ini turut mendorong pertumbuhan penduduk yang lebih merata serta berkontribusi terhadap pemerataan ekonomi di berbagai wilayah. Selain itu, transmigrasi juga memainkan peran penting dalam memperluas persebaran dan pelestarian budaya, sehingga memperkaya keberagaman budaya di daerah-daerah penerima transmigran.

Untuk itu, teori Akomodasi Komunikasi (Communication Accommodation Theory) dari Howard Giles digunakan sebagai landasan konseptual utama dalam penelitian ini. Teori ini menjelaskan bagaimana individu atau kelompok menyesuaikan pola komunikasinya ketika berinteraksi dengan pihak lain dari latar budaya yang berbeda (Pratiwi and Nurlatif 2021; Sari and Rahardjo 2019). Terdapat dua strategi utama dalam akomodasi komunikasi, yaitu konvergensi, yakni upaya mendekatkan gaya komunikasi demi menciptakan penerimaan sosial, dan divergensi, yaitu penegasan identitas kelompok yang khas di tengah tekanan lingkungan sosial (Suheri 2019; Widiyanti, Jelantik, and Astraguna 2024). Kedua strategi ini dapat diterapkan secara selektif oleh komunitas minoritas seperti Hindu Bali untuk membangun harmoni sosial tanpa kehilangan identitas budaya.

Lebih jauh, pendekatan ini akan dianalisis melalui perspektif GEP (Gender Equality and Social Inclusion) untuk melihat bagaimana kelompok rentan dalam komunitas terutama perempuan dan anak muda berperan dalam proses adaptasi dan komunikasi sosial (Muafiah, Puspita, and Wanda Damayanti 2021). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah dinamika integrasi dari sudut pandang mayoritas atau elit komunitas, tetapi juga dari perspektif kesetaraan dan keberagaman partisipasi sosial.



Penelitian ini menjadi penting untuk menjawab pertanyaan krusial sejauh mana komunitas Hindu Bali sebagai pendatang mampu mengelola keberhasilan ekonominya agar tidak menimbulkan konflik sosial, dan bagaimana strategi komunikasi mereka berperan dalam membangun integrasi sosial yang harmonis di tengah masyarakat multikultural Sulawesi Selatan.

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada penggalian makna, pengalaman, dan proses komunikasi sosial komunitas Hindu Bali sebagai penduduk pendatang di daerah transmigrasi Sulawesi Selatan. Metode ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait dinamika sosial, strategi komunikasi, serta tantangan yang dihadapi komunitas dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru yang multicultural (Astraguna, Listiawati, and Wijana 2020; Surahman 2016).

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi partisipatif, wawancara mendalam (in-depth interviews), dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, pemuda, serta ibu rumah tangga dari komunitas Hindu Bali, serta perwakilan masyarakat lokal dari kelompok etnis mayoritas di desa lokasi transmigrasi. Pemilihan informan dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas sosial dan budaya komunitas.

## **III. Pembahasan**

### **A. Akomodasi Komunikasi Komunitas Hindu Bali Sebagai Penduduk Pendatang Di Daerah Transmigrasi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunitas Hindu Bali sebagai kelompok pendatang di wilayah transmigrasi Sulawesi Selatan telah mampu membangun dan mempertahankan harmoni sosial melalui strategi komunikasi yang adaptif. Proses adaptasi sosial ini berlangsung dalam konteks masyarakat yang multikultural, di mana interaksi antar kelompok etnis sangat intens dan dinamis. Dalam konteks ini, teori Akomodasi Komunikasi (Giles) menjadi kerangka teoritik yang relevan untuk



memahami bagaimana komunitas Hindu Bali menyesuaikan gaya komunikasi mereka untuk menciptakan kohesi sosial.

Strategi konvergensi, yaitu bentuk penyesuaian komunikasi yang mendekatkan diri pada pola komunikasi masyarakat lokal, menjadi instrumen utama yang digunakan komunitas Hindu Bali. Mereka secara sadar menggunakan bahasa lokal (Bahasa bugis, Bahasa toraja, pamona, dan sebagainya), ketika berinteraksi dengan komunitas lokal, dan paling tidak ketika tidak memahami Bahasa, komunitas hindu Sulawesi selatan menggunakan dialek dan aksen Sulawesi selatan. Selain itu juga upaya senantiasa mengikuti norma sosial setempat, dan terlibat aktif dalam kegiatan sosial keagamaan lintas komunitas, seperti gotong royong, perayaan hari besar nasional, dan acara adat desa. Strategi ini tidak hanya berfungsi untuk mempererat hubungan antar kelompok, tetapi juga untuk membangun kepercayaan sosial (*social trust*) yang menjadi fondasi harmonisasi kehidupan bersama.

Selain konvergensi, komunitas Hindu Bali juga menerapkan strategi divergensi secara selektif dalam rangka menjaga identitas budaya dan keagamaannya. Misalnya, mereka tetap melestarikan perayaan ritual keagamaan seperti Galungan, Kuningan, dan Ngaben di lingkungan pura, serta mempertahankan sistem kekerabatan dan tradisi Bali lainnya. Namun, pelaksanaan aktivitas keagamaan ini tetap mempertimbangkan sensitivitas budaya masyarakat lokal dan dilakukan secara terbuka dan inklusif. Ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif untuk membangun harmoni tanpa meniadakan identitas diri.

Penerapan teori akomodasi sosial tidak hanya tampak dalam ranah bahasa dan budaya, tetapi juga dalam pola komunikasi interpersonal dan kelembagaan. Tokoh masyarakat Hindu Bali aktif menjalin hubungan formal dan informal dengan tokoh masyarakat lokal dan aparat desa, serta menjadi bagian dari forum musyawarah desa (musdes), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan kegiatan lintas agama. Strategi ini menunjukkan bahwa akomodasi bukan hanya upaya personal, melainkan sudah menjadi kebijakan sosial internal komunitas untuk menciptakan stabilitas sosial dalam jangka panjang.



## **B. Posisi Gender Equality and Social Inclusion**

Lebih jauh lagi, pendekatan Gender Equality and Social Inclusion memperlihatkan bahwa keberhasilan komunikasi sosial ini bersifat partisipatif dan inklusif. Perempuan Hindu Bali berperan dalam organisasi kemasyarakatan seperti PKK, kelompok arisan lintas etnis, serta kegiatan pendidikan anak. Keterlibatan mereka menjadi indikator bahwa harmoni sosial dibangun melalui peran lintas gender dan tidak hanya bergantung pada otoritas laki-laki atau tokoh adat. Generasi muda Hindu Bali juga menunjukkan pola adaptasi positif melalui interaksi sosial yang intens di sekolah, komunitas komunitas anak muda, dan kegiatan olahraga, yang mendorong lahirnya generasi yang toleran dan terbuka terhadap keragaman.

Temuan ini juga menunjukkan adanya inisiatif komunitas Hindu Bali secara aktif dan sadar dalam menjaga harmonisasi sosial, bukan semata-mata reaksi terhadap tekanan lingkungan. Harmoni sosial dibangun melalui pendekatan yang komunikatif, kolaboratif, dan strategis dengan mempertimbangkan kebutuhan komunitas lokal dan prinsip hidup berdampingan secara damai.

Dengan demikian, teori Akomodasi Komunikasi tidak hanya menjelaskan strategi linguistik atau perilaku komunikasi semata, tetapi juga menjadi kerangka konseptual untuk memahami bagaimana sebuah komunitas minoritas dapat menciptakan *resiprositas sosial*, stabilitas, dan harmoni dalam masyarakat yang pluralistik. Akomodasi dalam konteks ini merupakan wujud nyata dari diplomasi budaya komunitas Hindu Bali dalam mempertahankan eksistensinya tanpa menimbulkan konflik atau dominasi terhadap komunitas lain.

Dalam konteks transmigrasi, hal ini memperkuat temuan bahwa keberhasilan integrasi sosial tidak hanya ditentukan oleh kebijakan negara atau faktor ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan komunitas dalam melakukan akomodasi sosial melalui komunikasi yang reflektif, strategis, dan inklusif

## **IV. Penutup**

Penelitian ini menunjukkan bahwa komunitas Hindu Bali sebagai pendatang di wilayah transmigrasi Sulawesi Selatan memiliki kemampuan adaptasi sosial yang



tinggi, terutama melalui strategi komunikasi yang mencerminkan pemahaman terhadap dinamika sosial budaya masyarakat setempat. Keberhasilan ekonomi yang dicapai komunitas ini, meskipun positif dalam aspek pembangunan dan kesejahteraan, juga berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial yang dapat berkembang menjadi konflik horizontal, terutama jika tidak diimbangi dengan komunikasi yang inklusif dan adaptif.

Dalam kerangka Teori Akomodasi Komunikasi yang dikembangkan oleh Giles, komunitas Hindu Bali terbukti menerapkan dua strategi utama: *konvergensi* dan *divergensi*. Strategi konvergensi digunakan untuk menjalin kedekatan sosial dengan masyarakat lokal melalui penggunaan bahasa daerah, partisipasi dalam kegiatan desa, dan pemahaman terhadap norma sosial setempat. Sementara itu, strategi divergensi diterapkan untuk mempertahankan identitas budaya dan agama melalui pelestarian tradisi Hindu Bali secara kolektif namun terbuka terhadap publik.

Kedua strategi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat adaptasi, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol sosial untuk meredam potensi konflik bernuansa SARA yang dapat timbul akibat kesenjangan ekonomi dan perbedaan identitas budaya. Temuan ini memperkuat relevansi teori Akomodasi Komunikasi dalam konteks masyarakat multikultural dan memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang komunikasi sebagai sarana utama integrasi sosial.

Lebih jauh, pendekatan Gender Equality and Social Inclusion (GEP) dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa adaptasi sosial dan komunikasi yang harmonis tidak hanya bergantung pada elit atau tokoh adat, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif perempuan, anak muda, dan kelompok rentan lainnya dalam membangun kohesi sosial lintas etnis. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan inklusif dalam memahami dinamika sosial komunitas transmigran.

Dengan demikian, novelty dari penelitian ini terletak pada penekanan bahwa keberhasilan integrasi sosial tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomi atau kebijakan negara, melainkan secara mendalam dipengaruhi oleh kemampuan komunikasi lintas budaya yang dilakukan secara sadar, strategis, dan partisipatif oleh komunitas itu sendiri.



### Daftar Pustaka

- Andika, Arya Yulia. 2020. “Kepemimpinan Bali : Studi Kasus Transmigrasi Bali Di Kecamatan Sukamaju Tahun 1971-1997.”
- Astraguna, I. W. (I), N. P. (Ni) Listiawati, and I. N. (I) Wijana. 2020. “Dynamics of Inter-Cultural Communication at Multicultural Societies in Transmigrant Territory.” *International Journal of Social Sciences and Humanities* 4(1):43–58. doi: 10.29332/IJSSH.V4N1.395.
- Ekawati, Ni Wayan Wahyu. 2024. “Komunikasi Sosial Etnis Bali Dalam Menjaga Kerukunan Di Tengah Masyarakat Multikultur Dusun Sengkongo Desa Kuranji Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.” *Sadharananikarana* 15(1):72–86. doi: 10.25130/sc.24.1.6.
- Muafiah, Evi, Ayunda Riska Puspita, and Vivi Vellanita Wanda Damayanti. 2021. “Gender Equality and Social Inclusion (GESI) Pada Dua Sekolah Inklusi Di Ponorogo.” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 19(2):141–56. doi: 10.14421/musawa.2020.192.141-156.
- Nurlaili, Lutvi Dwi. n.d. “Transmigrasi Masyarakat Hindu Bali Di Seputih Raman Lampung Tengah.”
- Pratiwi, Aprilyanti, and Regiant Fachturahman Nurlatif. 2021. “Akomodasi Komunikasi Etnis Tionghoa Dan Sunda Di Surya Kencana Bogor.” 4(1):91–104.
- Sada, Clarry, Yabit Alas, and Muhammad Anshari. 2019. “Indigenous People of Borneo (Dayak): Development, Social Cultural Perspective and Its Challenges.” *Cogent Arts and Humanities* 6(1). doi: 10.1080/23311983.2019.1665936.
- Sari, Nadila Opi Pratitha, and Turnomo Rahardjo. 2019. “Akomodasi Komunikasi Antarbudaya (Etnis Jawa Dengan Etnis Minang.” *Interaksi Online* 7(4):1–10.
- Setijadi, Naniek. 2022. “Pelatihan Komunikasi Lintas Budaya Kepada Peserta Didik Politeknik Imigrasi (Poltekim) Kemenkumham Indonesia.” *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)* 5:1–10. doi: 10.37695/pkmesr.v5i0.1530.
- Suheri, Suheri. 2019. “Akomodasi Komunikasi.” *Jurnal Network Media* 2(1):40–48.
- Surahman, Dkk. 2016. *Metodologi Penelitian*. satu. Jakarta: Kementerian Kesehatan



Republik Indoensia.

Susanti, L. R. Retno, Made Darne, Nur Aeni Marta, Rizky Andhifani, and Luh Suwita Utami. 2024. “Studi Sosial Dan Ekonomi Transmigrasi Jawa-Bali Di Desa Tugumulyo.” 13(3):473–86.

Sutrisno, Herwin, Gagoek Hardiman, E. E. Pandelaki, and Theresia Susi. 2019. “Living in Harmony: Acculturation of Balinese and Dayak Ngaju Cultures in Basarang Jaya Village, Central Kalimantan.” *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 7(3):401–12. doi: 10.26811/peuradeun.v7i3.279.

Widiantari, Made, Sayu Kadek Jelantik, and I. Wayan Astraguna. 2024. “Intercultural Communication in Interethnic Families in Pagutan Barat Village, Mataram City.” *Journal of Digital Media Communication* 3(1):1–9. doi: 10.35760/dimedcom.2024.v3i1.11589.

Yuniza, Mailinda Eka, and Melodia Puji Inggawati. 2021. “The Urgency of Transpolitan Transmigration’s Regulation as an Effort to Accelerate National Development.” *Administrative and Environmental Law Review* 2(2):81–96. doi: 10.25041/aclr.v2i2.2326.